



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 767/IV/2013

III/APRIL 2013



UN Tak Serentak, Cermin Buruknya Manajemen Pendidikan



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA APRIL 2013

Kegiatan AKD DPR-RI pada minggu ketiga bulan April ini ditandai dengan Pidato Penutupan Masa Sidang III 2012-2013 oleh Ketua DPR-RI. Pidato Penutupan ini juga mengawali Masa Reses Persidangan III yang dimulai tanggal 13 April sampai 12 Mei 2013. Berikut ringkasan Pidato Penutupan tanggal 12 April 2013:

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Selama Masa Sidang III 2012-2013, Badan Musyawarah DPR-RI telah menetapkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dialokasikan waktu sebesar 60% dari semua kegiatan, dan sisanya 40% untuk fungsi Pengawasan dan Anggaran. Dengan alokasi tersebut, DPR telah menetapkan 6 (enam) RUU untuk disahkan menjadi UU, yaitu: RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, RUU tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*, RUU tentang Pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat.

Saat ini, Komisi III DPR telah mulai melakukan pembahasan atas RUU RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua RUU ini mengandung misi demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana dan adaptasi, serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang terjadi akibat perkembangan bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, serta nilai-nilai standar dan norma-norma



yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. KUHP merupakan Undang-Undang warisan pemerintahan Kolonial, maka kesempatan membentuk KUHP baru ini, merupakan suatu kesempatan emas, untuk membangun hukum yang sesuai dan cocok dengan jati diri bangsa sendiri. Demikian pula dengan RUU Hukum Acara Pidana, KUHAP dinilai telah ketinggalan zaman, sehingga harus direvisi. Revisi yang akan dihasilkan terhadap kedua UU ini diharapkan mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dan berdaya laku untuk jangka waktu lama. Melalui revisi KUHP diharapkan, beberapa rumusan tindak pidana yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, tidak diatur lagi. Sementara itu, bentuk-bentuk tindak pidana baru dirumuskan dalam KUHP yang baru. Namun harus dihindari munculnya pasal-pasal karet (*hatzai artikelen*) yang akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam reformasi hukum kita. Demikian

juga dengan hukum acara pidana, akan menghasilkan Kitab Undang-Undang yang mengayomi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Melalui KUHAP yang baru, diharapkan dapat diadopsi prinsip-prinsip baru dalam penyelesaian masalah-masalah pidana seperti mengakomodasi *alternative dispute* dalam penyelesaian perkara pidana melalui prinsip *restorative justice*.

Khusus mengenai kewenangan legislasi, baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3, telah memutuskan menegaskan tiga kewenangan DPD dalam bidang legislasi yaitu: menyusun

Program Legislasi Nasional, mengusulkan RUU, dan turut membahas RUU. DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, dan akan memasukkan dalam revisi UU No. 27 tahun 2009 yang sedang dalam proses pembahasan di DPR dan Tata Tertib DPR-RI. Penyempurnaan yang akan dilakukan, tidak pada tataran teknis, tetapi pada tataran kebijakan dan substansi. Adanya keputusan MK ini, diharapkan tidak menjadikan pembahasan RUU lebih berkepanjangan karena banyaknya pihak yang terlibat, tetapi justru harus lebih efektif, efisien dan berkualitas dalam menghasilkan UU yang strategis bagi kepentingan bangsa dan negara. Namun keputusan terakhir atas pembahasan RUU, tetap ada di tangan DPR dan Presiden. Terhadap Keputusan MK tersebut, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Selama Masa Sidang III 2012-2013, pelaksanaan fungsi pengawasan telah dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR dengan mengundang mitra-kerja maupun dalam bentuk kunjungan kerja spesifik ke daerah. Kegiatan lainnya, dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk DPR-RI, antara lain Tim Pengawas Century. Hampir setiap pekan, Tim Pengawas Century melakukan rapat dengan mengundang antara lain Kapolri, Jaksa Agung dan KPK. Untuk Kegiatan-kegiatan Timwas Century ini, telah dilaporkan dalam rangkuman kegiatan AKD di *Buletin Parleментарia* ini beberapa minggu yang lalu.

Terkait dengan pengawasan terhadap berbagai masalah kesejahteraan rakyat, khususnya dengan implementasi dari UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), saat ini sedang terjadi transformasi PT. Askes menuju BPJS Kesehatan. Ujicoba pelaksanaan jaminan kesehatan nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dilakukan mulai 1 April 2013 di Provinsi DKI Jakarta. Ujicoba ini diharapkan menjadi laboratorium pelaksanaan Jamkesmas, yang akan berlaku secara resmi pada tanggal 1 Januari 2014. Persoalan yang perlu ditangani oleh Pemerintah diantaranya, kualitas sumberdaya manusia, sarana-prasarana, serta koordinasi antarlembaga. Banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh Pemerintah, bukan saja dalam hal teknis, namun juga kesiapan konsep dan semangat perubahan dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pelayanan kesehatan. Komitmen yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat akan didukung Dewan, terutama bagi implementasi transformasi di bidang kesehatan masyarakat. DPR akan mengawal proses transformasi PT. Askes menuju BPJS Kesehatan, sesuai amanat UU.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, selama Masa Sidang III, Komisi-Komisi Dewan telah melaksanakan berbagai Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah, yang agendanya antara lain mengevaluasi program kerja dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, termasuk mengkritisi realisasi penyerapan anggaran dan Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI. Dewan juga telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK-RI Tahun Anggaran 2012,

untuk selanjutnya, BAKN-RI melakukan penelaahan dan menyampaikan hasil telaahan kepada Komisi-Komisi.

Dalam kaitan implementasi APBN Tahun Anggaran 2013 yang sedang berjalan, Dewan terus mengamati dan memantau perkembangan isu-isu ekonomi, antara lain permasalahan subsidi BBM. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah memperkirakan konsumsi BBM akan membengkak hingga 53 juta kiloliter melebihi kuota tahun 2013. Potensi pembengkakan subsidi ini sangat mungkin membebani APBN Tahun Anggaran 2013. Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu tahun 2013 mencapai Rp. 193,8 triliun. Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan kebijakan konkret untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi. Pemerintah seharusnya menyiapkan opsi untuk menghadapi skenario dalam upaya pengendalian jumlah konsumsi yang difokuskan pada dua opsi, yaitu penghematan dan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi. Namun, bila pada akhirnya Pemerintah mempersiapkan opsi kenaikan harga BBM dalam rangka memperbaiki kondisi fiskal dan moneter, Dewan meminta jaminan kepada Pemerintah bahwa opsi tersebut tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan secara matang dan terukur. Upaya yang harus diambil terkait energi BBM, harus bersifat komprehensif dengan perencanaan jangka menengah dan panjang, terkait dengan program pengembangan energi baru terbarukan.

Tema Umum

Selain melaporkan tiga fungsi Dewan, pidato penutupan Ketua DPR juga menyinggung beberapa tema antara lain masalah ekonomi yang menyinggung soal kenaikan harga kebutuhan pokok, harga BBM, dan revitalisasi produk pertanian. Masalah politik, hukum dan keamanan, disinggung tentang kesiapan KPU, Bawaslu dan DKPP dalam kegiatan menghadapi Pemilu 2014, dan beberapa aksi kekerasan seperti tewasnya Kapolsek Dolok Pardamean, peristiwa penyerbuan di LAPAS Cebongan Yogyakarta, massa di Palopo, penembakan anggota TNI di Papua dan Qonun Aceh tentang Lambang, Simbol dan Bendera GAM.

Dalam Pidato ini, ketua DPR berpesan agar masalah premanisme dan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat seperti mutilasi, kekerasan seksual terhadap anak, perampokan disertai pembunuhan, dan sebagainya, harus ditangani secara tuntas agar kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan dan Pemerintah dapat pulih kembali.

Diplomasi Parlemen

Dalam bidang diplomasi parlemen, Ketua DPR dalam Pidato Penutupan berpesan bahwa diplomasi Indonesia harus senantiasa memperjuangkan kepentingan nasional yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, konsolidasi demokrasi di tanah air, dan tercapainya keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Di era perdagangan bebas saat ini, diplomasi ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia. Perwakilan Indonesia di luar negeri adalah tulang punggung

upaya diplomasi ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan hubungan ekonomi di sektor perdagangan dan investasi harus menjadi salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Dengan demikian, harapan untuk memperdalam dan memperluas pasar tradisional Indonesia kepada pasar non-tradisional dapat terwujud.

Untuk kepentingan tersebut, Kementerian Luar Negeri harus lebih berperan aktif memfasilitasi pemasaran produk-produk nasional di pasar internasional, serta meningkatkan upaya perlindungan dan pembelaan terhadap produk-

produk nasional bilamana terjadi terjadi pengekangan, sehingga produk-produk nasional dapat lebih kompetitif dalam pasar internasional dalam rangka mendukung politik luar negeri yang lebih berorientasi pada masalah ekonomi. Selain itu, Pemerintah harus lebih meningkatkan fungsi komunikasi publik, khususnya terhadap bentuk-bentuk disinformasi tentang Indonesia di luar negeri. Diplomasi kita harus mampu menampilkan citra yang baik mengenai Indonesia dengan memberikan pemahaman yang benar tentang situasi dan kondisi yang terjadi di tanah air.**

UN Tak Serentak, Cermin Buruknya Manajemen Pendidikan



Siswa-siswi SMKN 2 Batam, Kepulauan Riau sedang mempersiapkan diri sebelum Ujian Nasional dimulai.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA yang berlangsung tidak serentak di seluruh Indonesia akibat keterlambatan percetakan, menunjukkan bahwa pemerintah terutama Mendikbud tidak sungguh-sungguh mempersiapkan anak didik kita sebagai calon pemimpin bangsa.

Dengan demikian harus ada yang bertanggungjawab, dan salah satunya adalah Mendikbud. Apalagi terjadi di 11 Provinsi sehingga menunjukkan buruknya manajemen pengelolaan pendidikan. Padahal Kemendikbud adalah satu-satunya Kementerian yang mendapatkan anggaran 20% dari APBN,” tandas Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Jakarta, Senin (15/4).

Untuk pertama kalinya



Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur.

sejak tahun 2005 UN tidak bisa dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Dari 33 Provinsi, ada 11 Provinsi tidak bisa melaksanakan UN hanya karena alasan teknis percetakan soal.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Asman Abnur menilai penundaan Ujian Nasional (UN) 2013 pada 11 provinsi karena masalah teknis itu merupakan kesalahan fatal. “Ini bukti kesiapan

pemerintah tidak ada,” kata Asman kepada tim Parle usai meninjau pelaksanaan UN 2013 di SMK Negeri 2 Batam dan SMA Negeri 3 Kota Batam, Senin (15/4).

Tak Perlu UN

Anggota Komisi X DPR RI Djamal Aziz menegaskan, bilamana Kurikulum 2013 sudah berjalan maka tidak perlu ada lagi Ujian Nasional (UN). Karena buku pegangan guru yang disebut Babon atau Buku Induk Pembelajaran hanya ada satu pedoman yang berlaku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.



Anggota Komisi X DPR Djamal Aziz.

Dengan Pembelajaran Kurikulum ini para guru punya kreativitas, jadi guru benar-benar akan dimudahkan dan guru tidak perlu menulis lagi,” jelas Djamal Aziz yang akrab dipanggil Habib kepada tim Parle usai meninjau pelaksanaan UN 2013 di SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 3 Batam, Senin (15/4).

Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi X Dedy Gumelar bahwa faktor utama adalah masalah pada pencetakan soal UN. “Ini memang dilakukan di masing-masing daerah dan kebetulan daerah tersebut tidak mempunyai kesiapan yang memadai, sehingga mengalami penundaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kejadian penundaan UN di 11 Provinsi tersebut, menunjukkan bahwa penyelenggaraan UN tahun ini adalah yang terburuk dan ambur-adul. “Tahun ini adalah UN terburuk. Dalam hal manajemennya perencanaan awal bagaimana. Sementara yang lainnya bisa melaksanakan tepat waktu,”

tegas Miing.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDI Perjuangan) menegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh harus bertanggungjawab atas tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 di 11 Provinsi (Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Bali, NTB, dan NTT).

“Dia harus bertanggungjawab kepada keseluruhan sistem dan bertanggungjawab pula kepada bawahannya bagaimana kinerja mereka,” ujar Itet saat ditemui tim Parle usai meninjau pelaksanaan UN 2013 di SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 3 Batam, Senin (15/4).

“Jadi Mendikbud tidak hanya sekadar minta maaf tapi juga harus bertanggungjawab, karena Mendikbud sudah membuat jutaan peserta UN mengalami stress berat atas kacau balaunya pelaksanaan UN 2013,” cetus Itet.



Anggota Komisi X DPR Itet Tridjayati Sumarijanto.

Turunkan Tiga Tim

Guna memantau pelaksanaan UN 2013, Komisi X DPR menerjunkan tiga tim di tiga Provinsi yakni Jawa Tengah, Kepri dan Kaltim. Pelaksanaan UN hari pertama di Kota Semarang ditinjau langsung oleh Tim Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi Agus Hermanto. Para Wakil Rakyat membidangi Pendidikan melakukan pantauan UN di tiga sekolah yakni MAN 1, SMAN 1 DAN SMKN 7. Senin (15/04).



Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar.

“Pengiriman dan penerimaan soal pada hari H sudah tepat sesuai jadwal. Ini sangat positif, kita lihat tidak ada kecurangan sama sekali dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap,” ujar Agus usai melakukan pantauan di SMKN 7 (STM Pembangunan).

Sementara itu, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 di SMK Negeri 2 Batam dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Soerya Respartiono didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Asman Abnur beserta tim Komisi X saat mengunjungi salah satu ruang ujian di SMK Negeri 2 Batam, Senin (15/4).

“Mudah-mudahan seluruh siswasiswi di SMK Negeri 2 Batam ini lulus semua,” tutur Soerya sambil membuka amplop bahan-bahan UN 2013 yang disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi X beserta tim Komisi X dan menunjukkan bahan-bahan UN tersebut kepada wartawan.

“Alhamdulillah, pelaksanaan UN 2013 di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau umumnya dinyatakan tidak ada masalah,” kata Soerya.

Menurutnya, sejauh ini belum ada laporan kekurangan soal maupun siswa yang tidak bisa mengikuti UN di seluruh wilayah Kepri. UN tingkat SMA/SMK di Kepri diikuti 16.692 siswa yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Di Batam, UN diikuti 3.859 siswa SMA dan 3,283 siswa SMK. (hr/iw)

DPR Tegaskan Kementan dan Perdagangan Tidak Serius Urusi Pangan

DPR menilai Kementerian Pertanian dan Perdagangan tidak memberi perhatian serius dan tidak memberikan insentif untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia.

“Usaha pertanian dan peternakan ternyata tidak memberi gairah dan nilai tambah kepada petani, padahal selama ini Indonesia merupakan negara agraris namun justru mengimpor komoditas tersebut,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat membacakan pidato penutupan masa persidangan III tahun sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jum’at (12/4).

Dewan, lanjutnya, menyayangkan lambatnya antisipasi terhadap gejolak harga oleh Kementerian terkait, sehingga berdampak luas bagi perekonomian masyarakat. “Permasalahan komoditas pangan saat ini tidak dapat disederhanakan hanya disebabkan oleh adanya kelangkaan dan kenaikan

harga saja,” paparnya.

Menurutnya, permasalahan daging sapi, bawang, dan produk pangan lainnya merupakan “lahan empuk” yang dimanfaatkan oleh para pedagang dan sebagian importir untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa bekerja keras.

Sektor pertanian, lanjut Marzuki, merupakan sektor yang utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, di mana faktor produksi, ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan menjadi acuan. “Untuk itu Dewan mendesak agar segera ada kebijakan untuk merevitalisasi sektor pertanian dan membenahi tata niaga yang selama ini diperkirakan dikuasai oleh kartel dalam perdagangan komoditas pertanian,” tegasnya.

Dewan, paparnya, menekankan pentingnya perbaikan regulasi impor



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

produk hortikultura dan pangan, secara keseluruhan. Dewan menyoroti dan mempertanyakan peran Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang seharusnya sudah memantau kemungkinan gangguan produksi seperti gangguan cuaca, hama, dan lain-lain, sehingga bila terpaksa impor sudah diketahui sejak awal. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar berjabat tangan dengan Pimpinan DPR.

Rapat paripurna DPR hari ini Jumat (12/4) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengesahkan pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah dan pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam laporannya di rapat paripurna, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan bahwa pembentukan daerah otonom baru (DOB) merupakan suatu upaya dalam penataan daerah yang memerlukan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga lebih efektif dan efisien sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Politisi dari Partai Golkar itu menjelaskan sesuai dengan surat keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR tanggal 24 Mei 2012 dan surat pimpinan DPR tanggal 25 Mei 2012 memutuskan menyetujui penanganan 19 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DOB diserahkan kepada Komisi II DPR untuk memproses pembicaraan tingkat I.

Ia menambahkan proses rangkaian panjang dari pembahasan terhadap 19 RUU tersebut sudah dimulai dari tanggal 13 Juni 2012 dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah yang juga mengikutsertakan DPD dalam proses pembahasannya. Dimana pada tanggal 25 Oktober 2012



dalam rapat paripurna DPR telah disahkan lima RUU dan telah menjadi Undang-Undang dan pada tanggal 14 Desember 2012 juga telah disahkan tujuh RUU menjadi Undang-Undang.

Sedangkan terhadap tujuh sisa RUU pembentukan DOB lainnya dilanjutkan pembahasannya adalah Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan yang kesemuanya ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Agun, terhadap tujuh RUU pembentukan DOB itu dalam pembahasannya baik di tingkat Panja maupun di tingkat Timus/Timsin dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari sampai dengan 9 April 2013 yang dilakukan baik di DPR maupun secara konsinyering. “Dalam rapat-rapat itu menghadirkan kembali Gubernur dan pimpinan DPRD provinsi induk serta bupati dan pimpinan DPRD kabupaten induk,” ujarnya.

Hal ini kata Agun untuk memastikan dan berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu ketika sebuah daerah dimekarkan dan diresmikan menimbulkan persoalan-persoalan seperti pengalihan aset, batas wilayah, bantuan dana hibah, maupun penyerahan sumber daya manusia yang tidak konsisten setelah UU itu dilakukan.

Selanjutnya pada pengambilan keputusan tingkat I dalam rapat kerja dengan Mendagri, perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM serta dihadiri juga oleh Komite I DPD, diputuskan fraksi-fraksi di DPR, pemerintah dan DPD pada tanggal 11 April 2013 akhirnya hanya menyetujui dua dari tujuh pembentukan DOB yakni pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah dan pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sedangkan terhadap sisa lima RUU pembentukan DOB lainnya yakni Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi

Sumatera Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan yang kesemuanya ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut Agun, Komisi II DPR akan tetap melanjutkan pembahasannya pada masa persidangan IV tahun 2012-2013, bulan Mei hingga Juli 2013.

Sementara itu rapat paripurna yang dihadiri Mendagri Gamawan Fauzi itu juga sempat diinterupsi oleh sejumlah anggota DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani menyatakan kekecewaannya karena Kabupaten Musi Rawas Utara yang sudah layak menjadi DOB tidak disahkan hari ini. “Padahal Musi Rawas Utara ini sudah memenuhi persyaratan, baik teknis maupun administratif,” kata Yani dalam rapat paripurna.

“Kenapa Musirawas Utara tidak disahkan hari ini. Pada hari ini jalan lintas Sumatera dibendung. Saya minta pada masa sidang berikutnya Musi Rawas Utara bagian yang akan disahkan,” tandasnya.

Reaksi sebaliknya ditunjukkan anggota Komisi III dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding. Ia mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Komisi II yang telah mengesahkan DOB Morowali Utara, Sulawesi Tengah. “Kebetulan Morowali Utara itu adalah dapil saya,” kata Sudding.

Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutannya pada rapat paripurna mengatakan penataan daerah yang meliputi pembentukan dua DOB ini tentu bukan untuk mengakomodasi kepentingan politik lokal. Namun diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien serta terbukanya aksesibilitas di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gamawan mengatakan dengan disetujuinya dua RUU tentang pembentukan DOB tersebut, maka jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 538 yang terdiri atas 34 provinsi, 411 kabupaten dan 93 kota. (nt)/foto:iwan armanias/parle.

Rapat Paripurna DPR Sahkan UU No. 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat akhirnya disahkan di Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini, Jumat (12/4) di Gedung DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Dalam laporannya di rapat paripur-

na, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan dalam rapat konsultasi atau lobby pada tanggal 6 April 2013 antara Komisi II DPR dengan pemerintah, DPD serta pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, pemerintah Kabupaten Sorong dan pemerintah Kabupaten Tambrauw menghasilkan beberapa kesepakatan yang sudah dilaporkan pada rapat panja pada tang-

gal 10 April 2013.

Adapun kesepakatan dari rapat konsultasi itu diantaranya terhadap penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat akan dilakukan dengan pendekatan komprehensif sesuai dengan keputusan Mahkamah



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar.

Konstitusi (MK) No. 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 bahwa empat distrik dari Kabupaten Manokwari yakni distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Kenopi dan distrik Mubrani dan satu distrik dari Kabupaten Sorong yakni distrik Moraid menjadi bagian dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw.

Kesepakatan lainnya dalam rapat konsultasi itu adalah selanjutnya menugaskan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Sorong, pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk mensosialisasikan kesepakatan ini kepada semua pihak yang terkait dan masyarakat di masing-masing wilayahnya.

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan dalam pengambilan keputusan tingkat I yang dilakukan dalam rapat kerja dengan Mendagri, perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM serta dihadiri juga oleh Komite I DPD dengan agenda mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat akhir pemerintah dan DPD pada tanggal 11 April 2013 diputuskan bahwa fraksi-fraksi dan pemerintah serta DPD menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Sementara itu Mendagri Gamawan

Fauzi dalam sambutannya pada rapat paripurna mengatakan pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat merupakan pelaksanaan putusan MK No. 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 terkait pasal 3 ayat (1) UU no 56 tahun 2008 mengenai cakupan wilayah, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mengikutsertakan empat distrik dari Kabupaten Manokwari yakni distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Kenopi, distrik Murbani dan satu distrik dari Kabupaten Sorong yaitu distrik Moraid menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Tambrauw.

Mendagri melanjutkan untuk pasal 5 ayat (1) mengenai batas wilayah, menyatakan batas-batas wilayahnya harus disesuaikan dengan perubahan cakupan wilayah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan. (nt)/foto:iwan armanias/parle.

Rapat Paripurna DPR Tunda Pengesahan RUU Ormas

Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akhirnya ditunda. Anggota Dewan sepakat untuk membahas RUU ini pada masa persidangan berikutnya.

“Dalam suratnya, pimpinan Panitia Khusus (Pansus) berharap dan meminta agar pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ormas yang sedianya dilaksanakan pada rapat paripurna hari ini, ditunda dan dilaksanakan pada masa persidangan berikutnya,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ketika memimpin Sidang Paripurna terakhir untuk Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jumat (12/4).

Priyo menyatakan persetujuan dari seluruh anggota DPR akan ditindak-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso didampingi Ketua DPR Marzuki Alie.

lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. DPR juga masih akan mendengarkan suara sejumlah ormas yang menginginkan RUU itu untuk ditunda.

Ditemui usai mengikuti Sidang Paripurna, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul

Malik Haramain membenarkan penundaan pengesahan RUU Ormas ini.

“Akhirnya ditunda dan alasan penundaan itu sebenarnya teknis karena substansi secara prinsipal, isinya sudah disepakati semua fraksi termasuk perubahan-perubahan terakhir. Perubahan-perubahan yang diusulkan Muhammadiyah itu sudah kita akomodir,” kata Abdul Malik.

Abdul Malik juga menyatakan bahwa Pansus telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk menunda pengesahan. Ia memastikan isi redaksional RUU akan dibenahi oleh Pansus pada masa persidangan berikutnya, dan kemudian akan diagendakan untuk pengesahan. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Hanya Habiskan 0,19 Persen APBN 2013

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menetapkan rancangan anggaran DPR tahun 2014 sebesar Rp 3,28 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar 9,44 persen dibandingkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013. Kesepakatan tersebut diambil setelah BURT menerima usulan seluruh alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal.

“Perlu kami sampaikan bahwa besaran rancangan anggaran DPR 2014 ini hanya 0,19 persen dari belanja negara dalam APBN tahun 2013. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar Rp2,99 triliun,” papar Wakil Ketua BURT M. Syahfan Badri Sampurno dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Jumat (12/4).

Syahfan menjelaskan rancangan anggaran DPR tersebut terbagi ke dalam anggaran satuan kerja dewan sebesar Rp2,35 triliun dan satuan kerja sekretariat jenderal sebesar Rp923 miliar.

“Untuk memenuhi tata tertib DPR Pasal 88 ayat 1, BURT melakukan pembahasan rancangan anggaran DPR tahun 2014 bersama Banggar pada tanggal 9 April 2013. Dan selanjutnya BURT menyampaikan surat kepada pimpinan DPR tentang rancangan anggaran DPR tahun 2014 agar dilaporkan pada rapat konsultasi pengganti badan musyawarah antara pimpinan BURT yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2013,” kata dia menjelaskan.

Menanggapi laporan BURT, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan walaupun DPR memiliki hak untuk menggunakan APBN, namun DPR hanya mengusulkan 0,19 persen dari APBN. Priyo juga menyatakan bahwa institu-



Wakil Ketua BURT M. Syahfan Badri Sampurno berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

sinya telah memangkas biaya kunjungan ke luar negeri.

“Meskipun kami punya hak, tapi DPR hanya mengusulkan 0,19% dari APBN 2013. Kita juga telah berhasil menekan kunjungan ke luar negeri hingga 60%. Pimpinan membatasi hanya kunjungan yang bersifat legislasi dan kunjungan luar negeri yang bersifat kenegaraan,” kata Priyo.

Terkait dengan usulan pembentukan RUU di tahun 2014, Syahfan menyatakan jumlah usulan disampaikan oleh seluruh alat kelengkapan dewan sebanyak 53 RUU dengan rincian usul insiatif (25), usul pemerintah (16) ratifikasi dan pemekaran (12). (sf) Foto:wy/parle

Priyo Budi Santoso Berharap Mahasiswa Berperan Perbaiki Nasib Bangsa

Generasi muda dan mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki nasib bangsa, serta dapat mencintai negeri agar bisa menjadi seorang pemimpin yang diharapkan dimasa yang akan datang.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pada saat memberikan ceramah di depan sekitar empat ratus mahasiswa, dari 15 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Sabtu (13/4) siang.

Politisi Golkar ini mengajak mahasiswa untuk mencintai negeri ini, bahkan tidak segan-segan mengajak mahasiswa untuk menjadi kader politiknya jika mau ikut memperbaiki nasib bangsa, serta menitipkan tongkat kepemimpinan di

pundak mahasiswa.

Dia mengakui, bahwa membangun demokrasi itu biasanya dibarengi dengan munculnya sejumlah penyakit seperti gesekan-gesekan yang tidak terarah dan juga termasuk penyakit korupsi. “Jika hal ini dibiarkan akan menjadi demokrasi yang liar, liberal dan berbahaya,” tandas Priyo.

Lebih lanjut Priyo mengatakan, sesungguhnya gambaran demokrasi yang berlangsung di Indonesia telah memperlihatkan adanya kemajuan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan penilaian internasional bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Sejak tahun 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih lang-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyerahkan cendera mata kepada Dekan Fisip Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Ahmad Muftiq.

sung oleh rakyat. Hal itu merupakan sebuah lompatan besar bagi kemajuan demokrasi Indonesia. Bahkan di Amerika Serikat pemilihan Presiden tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi hanya dilakukan melalui *electorial college* di setiap negara bagian, dan saat ini di Indonesia pemilihan Kepala Daerah pun dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“ Atas dasar itu, sesungguhnya Indonesia sudah dapat disejajarkan dengan negara demokrasi lainnya dan bahkan dapat dijadikan salah satu rujukan bagi negara berkembang

lainnya dalam mensejajarkan demokrasi,” tegasnya.

Meski demikian diingatkan, Indonesia merupakan salah satu negara besar dalam demokrasi, harus tetap mengutamakan nilai-nilai keluhuran bangsa, saling toleransi dan menjunjung tinggi perbedaan. DPR juga saatnya menjadi tumpuan bagi rakyat dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu negara yang adil dan sejahtera.

Dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga membeberkan besarnya peran pers sebagai pilar bangsa ke 4. Ditegaskan, pers bisa lebih sakti dari DPR dan bahkan Presiden, karena itu pers harus tetap memiliki idealisme sebab negara ini sedang dipertaruhkan.

Kehadiran Priyo Budi Santoso di Universitas Brawijaya dalam rangka memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam rangka memberikan pengalaman dalam sekolah parlemen 2013. Ini merupakan agenda tahunan ke dua BEM FISIP Universitas Brawijaya sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar seolah-olah menjadi anggota DPR walaupun hanya 2 hari.

Sementara itu ketua Panitia penyelenggara Atikah Delany Yasmin mengatakan bahwa, dalam rapat paripurna akan melakukan pembahasan tingkat satu dan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa, dan dalam Rapat paripurna akan diambil keputusan atas RUU tentang Desa tersebut. (spy). foto: spy/parle

Komisi VIII Kunjungi Kawah Timbang, Batur, Banjarnegara



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR saat mengunjungi masyarakat sekitar Kawah Timbang, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Komisi VIII DPR RI, Sabtu (13/4) melakukan kunjungan spesifik ke Kawah Timbang, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah untuk melihat secara langsung kondisi warga sekitar Kawah Timbang. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh bagaimana kesiapan dan antisipasi dari aparat setempat terhadap kemungkinan terjadinya kondisi terburuk dari meningkatnya aktivitas Gunung Dieng.

“Sebenarnya kunjungan kami ini tidak direncanakan, namun karena beberapa waktu lalu kami mendengar dan melihat dari media massa bahwa aktivitas kawah timbang semakin meningkat, bahkan sempat mengeluarkan gas beracun sehingga statusnya pun berubah menjadi siaga, maka kami tergugah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat Dieng, khususnya warga sekitar kawah timbang, dan

bagaimana antisipasi dan penanganan terhadap kemungkinan terburuk,” jelas Ida Fauziyah.

Seperti diketahui sejak pertengahan Maret lalu aktivitas Kawah Timbang yang merupakan bagian dari Gunung Dieng meningkat. Bahkan akhir Maret (27/3) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status kawah Timbang dari waspada menjadi Siaga. Menurut Kepala bidang pengamatan dan penyelidikan Gunung api yang ikut mendampingi Komisi VIII saat melakukan kunjungan spesifik, M Hendrasto ketika itu di kawah timbang

terlihat adanya aliran gas CO₂, bau berangas pun tercium lemah dan sedang pada jarak seribu meter.

Dalam kunjungan tersebut Komisi VIII DPR RI melihat secara langsung asap putih yang berasal dari lembah-lembah di Kawah Timbang. Namun sejauh ini berdasarkan hasil penelitian PVMBG sepanjang masih dalam radius satu kilometer masyarakat masih dalam kondisi aman. Namun dengan beberapa catatan, diantaranya, jika tidak terekam gempa vulkanis atau tektonik lokal yang menimbulkan keluarnya gas beracun dari kawah timbang. Jika

terjadi gempa yang memicu keluarnya gas beracun dari kawah timbang, masyarakat diharuskan segera keluar dari kawasan kawah Timbang.

Selain itu rekomendasi dari PVMBG lainnya adalah agar masyarakat tidak melakukan penggalian tanah di sekitar Kawah Timbang dengan kedalaman lebih dari 0,5 meter. Hal tersebut dikarenakan akan berpotensi keluarnya bahaya gas CO, CO₂, dan H₂S yang membahayakan bagi kesehatan. (Ayu) foto:ayu/parle

Pramono Anung Berharap Australia Tidak Persulit Pemberian Visa Pelajar Indonesia



Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima Delegasi Parlemen Australia.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung (15/4) mengharapkan Australia tidak mempersulit pemberian visa bagi pelajar atau mahasiswa Indonesia yang akan belajar di Australia. Pelajar atau mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di negara Kanguru tersebut kini jumlahnya cukup besar berkisar antara 16 hingga 18 ribu orang.

“Saya mengharapkan, berkaitan dengan visa ini terutama bagi pelajar Indonesia yang belajar di Australia tidak dipersulit, karena memang prosedurnya agak bertele-tele,” kata Pramono Anung menjawab pers usai menerima kunjungan Delegasi Parlemen Australia di Gedung DPR, Senin

Delegasi Parlemen Australia terdiri empat orang dipimpin Harry Jenkins (mantan Ketua DPR Australia), Alex Garrager, Paul Nevile dan Mal Wesher.

Menurut Pramono, Delegasi Parlemen Australia berkunjung ke Indonesia dalam rangka mempererat hubungan parlemen kedua negara. Seperti diketahui, Harry Jenkins adalah mantan Ketua Parlemen dan Ketua Partai yang ada di Australia dan posisinya cukup strategis.

Menyinggung hubungan antara Indonesia dan Australia, Pimpinan

Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, selama ini telah berlangsung dengan baik dan dari tahun ke tahun mengalami perbaikan serta mengalami peningkatan hubungan yang cukup strategis.

Hubungan yang terjalin baik tersebut ujar Pramono, tidak semata-mata antar pemerintah dengan pemerintah dan DPR dengan Parlemen Australia. Tetapi juga hubungan masyarakat dengan masyarakat atau hubungan bisnis dengan bisnis. Demikian pula kerja sama bidang pendidikan, terbukti banyaknya pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Australia. (mp) foto: od/parle

Setjen DPR Beri Pembekalan Tenaga Ahli Anggota DPR



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti.

Untuk yang kedua kalinya Kesetjen DPR RI Senin (15/4) menggelar pembekalan Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR RI setelah sebelumnya tahun 2011 digelar acara serupa. Dalam sambutannya sesaat sebelum membuka acara tersebut, Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti mengatakan bahwa acara pembekalan TA DPR RI ini dilakukan Kesetjen DPR RI bukan semata untuk menjalankan arahan dari Anggota DPR RI saja, melainkan juga untuk memberi pemahaman yang jelas terhadap tugas-tugas Anggota Dewan.

“Diakui atau tidak TA merupakan bagian dari Kesetjen DPR RI yang bersama-sama membantu tugas dewan dalam melaksanakan Ketiga Fungsi Dewan, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan,” jelas Winantuningtyastiti sesaat sebelum membuka Acara Pembekalan TA Anggota DPR RI.

Apalagi menurut Win, begitu ia biasa disapa, di era reformasi seperti sekarang ini dimana masyarakat memi-

liki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, termasuk penilaiannya terhadap anggota DPR RI. Sayangnya, karena kebebasan itulah, terkadang Anggota DPR RI secara keseluruhan yang mendapat stigma negatif atau kecaman dari masyarakat, hanya karena “ulah” atau masalah hanya segelintir oknum Anggota saja. Hal itulah yang menjadi tantangan sekaligus peran TA dan setjen DPR RI untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

“Oleh karena itulah diadakan acara ini untuk menyatukan potensi dan kemampuan serta semakin meningkatkan sinergi yang kuat antara Kesetjen DPR RI dengan Tenaga Ahli demi membangun image positif DPR RI secara kelembagaan,” ungkap Win.

Sementara itu, dalam laporannya Ketua Panitia Acara, Tatang Sutharsa mengatakan dari 270 undangan yang disebar ke seluruh Tenaga Ahli, hanya 128 orang TA yang bersedia mengikuti acara ini. Padahal menurutnya acara ini akan memberikan pemahaman terhadap tugas-tugas konstitusional DPR RI yang dijalankan anggota Dewan,

dan TA lah yang membantu secara substansi fungsi dan tugas anggota dewan tersebut.

Ditambahkan Tatang, acara dibagi menjadi beberapa sesi, pertama adalah penjelasan peran Kesetjen DPR RI dalam rangka membantu dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi dewan, Sesi ini diisi oleh pemaparan dari Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti. Dilanjutkan dengan penguatan kelembagaan DPR RI oleh Wasekjen DPR RI, Achmad Djuned pada sesi kedua.

Sesi ketiga pemaparan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI yang dijelaskan oleh K Johnson Rajagukguk, Sesi keempat mengenai Hak dan Kewajiban Tenaga Ahli yang dijelaskan oleh Slamet Sutarsono, dan sesi kelima mengenai Fungsi Anggaran DPR RI yang dipaparkan oleh Plt Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksana APBN, Setyanta Nugraha. Serta Kepala Biro Persidangan, Bambang Susetio Nugroho yang akan memaparkan tentang Pengawasan Fungsi dan Tugas Dewan. (Ayu) foto : wahyu/parle



Wakil Sekjen DPR RI Achmad Djuned memberikan Pembekalan Tenaga Ahli Anggota DPR RI.

DPR Akan Perjuangkan Ketidakadilan Pemberian Bea Siswa



Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi Anggota Komisi X DPR Dedy Gumelar menerima kunjungan Delegasi Forum Komunikasi Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi anggota Komisi X DPR Dedy Gumelar, di lantai III Gedung Nusantara III Senayan, menerima kunjungan Delegasi Forum Komunikasi Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Selasa (16/4).

Delegasi yang dipimpin Sahril Buchori dalam kesempatan ini menyampaikan masalah yang bertalian dengan pembiayaan pendidikan, terutama masalah ketidakadilan dalam pemberian bea siswa. Menurut Sahril ketidakadilan tersebut diantaranya dalam pemberian bea siswa bagi calon dosen, lebih diprioritaskan kepada mahasiswa jurusan strategis seperti MIPA, sementara bagi mahasiswa jurusan sosial dianaktirikan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X Dedy Gumelar menegaskan bahwa pemberian bea siswa bagi mahasiswa jurusan ilmu sosial harusnya mendapat perlakuan yang sama. Pasalnya ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU No. 12/2012 bahwa rumpun ilmu sudah dibahas dengan seksama, salah satunya ilmu sosial harus masuk program itu. Dengan demikian, tidak relevan kalau memprioritaskan pemberian bea siswa hanya kepada jurusan MIPA. "Bea siswa adalah masalah akses.

Sampaikan saja proposalnya akan saya sampaikan ke Dirjen," tegasnya

Menurut Dedy yang akrab disapa Miing, menjadi kewajiban sebagai anggota DPR untuk memperjuangkan ketidakadilan ini. Ini adalah hak para mahasiswa yang sudah tercantum dalam APBN. Hak mahasiswa dengan minimal IPK 3,25 bisa diperjuangkan untuk mendapatkan bea siswa bukan karena anak MIPA atau sosial.



Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Anggota Komisi X DPR Dedy Gumelar.

Kepada para mahasiswa yang merasa dirugikan, silahkan membuat proposal dan diajukan bea siswanya ke DPR. "Sampaikan ke ruang saya, saya bikinkan rekomendasi lalu saya bicarakan dengan Dirjen untuk dilaksanakan beres itu, selesai," katanya lagi.

Ditegaskan Miing, kalau soal aturan yang mendapatkan bea siswa adalah

tidak terbatas kepada rumpun ilmu. Siapapun dia, bea siswa unggulan dan bidik misi sudah tidak ada masalah, bahkan pada awal April anggaran sudah mulai cair.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa hampir 16 tahun pendidikan di Indonesia ini tidak memiliki paedagogi yang valid, artinya selama 16 tahun tidak melakukan sensus pendidikan secara terdata dengan baik, sehingga anggaran pendidikan tidak efektif.

Yang dipahami, lanjut Miing, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi dan UU No. 20/2003 serta APBD juga 20%. Padahal, sesungguhnya APBN yang 330 triliun atau 20% dari 1600 T itu tidak seluruhnya menjadi milik pendidikan atau Kemendikbud. Dari 330 T itu sebanyak 125 T untuk membayar gaji guru sesuai keputusan MK agar gaji guru dibayar dari 20% anggaran pendidikan. Harusnya guru dianggaran melalui DAU menjadi gaji PNS, sementara 70% dari PNS adalah guru.

Dikatakan, sebanyak 47 T adalah tunjangan sertifikasi, sisanya dibagi 18 kementerian dan lembaga termasuk Kemenag paling besar 37 T. Yang dikelola Kemendikbud hanya 73 T dari 330 T, seandainya 20% dari APBN, semua mahasiswa bebas biaya tak perlu lagi bea siswa. Miing mengatakan, Menteri pendidikan paling banyak di dunia hanya di Indonesia. Menkes juga merangkap menteri pendidikan sebab menyelenggarakan fungsi pendidikan, demikian pula Menteri Agama juga menjadi menteri pendidikan, sampai IAIN membikin fakultas kedokteran.

"Ini yang tengah kami perjuangkan, seharusnya anggaran pendidikan menjadi satu pintu di Kemendikbud karena leading sector Kemendikbud. Anggaran yang menyebar di beberapa departemen sulit untuk menariknya," tandas Miing menambahkan. (mp) foto:od/parle

Pemerintah Diminta Serius Tangani Pencurian Minyak Mentah di Riau



Anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Kasus pencurian minyak mentah di Provinsi Riau dinilai sudah memasuki angka yang luar biasa, apalagi dilakukan oleh penjahat yang terorganisir dan didukung oknum aparat. Negara,

dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini.

“Saya menilai kasus pencurian minyak mentah ini sudah sangat luar biasa. Masalah keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab negara, khusus di wilayah operasi pemerintah, Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Kontrak Kontraktor Kerja Sama (KKKS) perlu menyiapkan *design* khusus untuk merumuskan langkah yang dapat diambil,” kata Bobby Adhityo Rizaldi anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Provinsi Riau, di Pekanbaru, Senin (15/4).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan langkah nyata harus segera dilakukan agar tidak mengganggu iklim investasi serta upaya untuk mengejar target *lifting* minyak bumi yang telah

ditetapkan pemerintah bersama DPR.

Dalam rapat Tim Kunjungan Kerja dengan SKK Migas yang melibatkan perusahaan KKKS, sejumlah laporan pencurian mengemuka. Albert Simanjutak dari Chevron menyebut 35 kasus pencurian berhasil diungkap sampai awal tahun ini. “Pelaku sudah mengancam para petugas yang berada di fasilitas produksi,” keluhnya.

Laporan lain datang dari PT. Medco dan BOB PT. BSP Pertamina Hulu yang menyebut pelaku pencurian didukung oleh oknum aparat Polri, TNI bahkan Kejaksaan. “Bahkan setelah pencuri berhasil ditangkap datang surat dari anggota DPRD setempat meminta pelaku dibebaskan,” kata salah seorang juru bicara perusahaan. (iky)

Kuota Haji Tak Sesuai, Komisi VIII Akan Pertanyakan Kemenag



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

Kunjungan Kerja Komisi VIII menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah kuota haji dengan jumlah penduduk yang ada di Bangka Belitung (Babel). Dalam laporan yang diterima

Komisi VIII, Babel hanya mendapat kuota sebanyak 913 jemaah per tahun, sedangkan seharusnya 1400 jemaah, karena jumlah penduduk Babel mencapai 1,4 juta jiwa.

“Yang disyukuri pertama di Indonesia termasuk Babel, bahwa ongkos naik haji mengalami penurunan 90 dolar. Jangan dilihat persentase penurunannya, tapi semangat perjuangan Anggota DPR dan juga Kementerian Agama (Kemenag). Terkait dengan persentase kuota jemaah haji di Babel yang tidak sesuai, akan saya bicarakan dengan Kementerian Agama maupun Dirjen Haji. Karena seharusnya satu per mil dengan penduduk di Babel yang 1,4 juta harusnya kuotanya 1400 jemaah haji. Ini akan kami pertanyakan kepada Kemenag. Perbedaan itu tidak bisa terjadi, harus ada keadilan,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini di Aula Kantor Gubernur Babel, Senin (15/4).

Terkait dengan *waiting list* jemaah haji di Babel yang mencapai tahun 2025, Jazuli memastikan bahwa *waiting list* tersebut tidak hanya terjadi di Babel, namun hampir di seluruh Indonesia. Politisi PKS ini menambahkan, dalam hal *waiting list* ini ada peranan dari Pemerintah Arab Saudi.

“Pemerintah Arab Saudi mengatakan daya tampungnya terbatas. Saat ini di Mina Jadid sudah menampung 20 ribu jemaah. Ada juga terobosan apakah nanti tenda-tenda akan dibuat seperti apartemen agar dapat menampung lebih banyak, karena kalau model tenda seperti sekarang, tidak bisa menampung jumlah yang banyak,” tambah Jazuli.

Jazuli juga menyesalkan perluasan fasilitas tempat tinggal di Makkah tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Ia berjanji untuk mendalami permasalahan serius ini dan segera

melakukan rapat dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Babel Hatamar Rasyid saat rapat kerja melaporkan bahwa kuota haji untuk Babel masih kurang. Hingga kini, kuota haji untuk wilayah Babel hanya 913 jemaah haji dan untuk waiting list-nya hingga tahun 2025.

Serap Masukan dari Daerah

Ketua Tim kunker Jazuli menyatakan kunker dalam masa reses ini bertujuan untuk silaturahmi, mendengar hambatan, termasuk mencari catatan-catatan serta masukan dari Pemda Provinsi Babel. Masukan terkait dengan lingkup kerja ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan rapat kerja Komisi VIII dengan mitra kerja terkait.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini menyerahkan bantuan sosial kepada Wakil Gubernur Babel Rustam Effendi.

“Kita ingin mendengar hambatan ataupun masukan dari Pemda Babel. Kita juga ingin tahu *back up* Pemda itu seperti apa, baik itu provinsi ataupun kabupaten-kota. Kalau ada hambatan ataupun permasalahan, kita tentunya

ingin buka sumbatan-sumbatan itu,” ujar Jazuli.

Politisi PKS ini juga menyatakan bahwa untuk membangun rakyat dan bangsa harus ada kebersamaan, koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, ketika ada permasalahan di daerah, bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.

Tim Kunker yang beranggotakan 12 orang anggota disambut oleh Wakil Gubernur Babel Rustam Effendi dan langsung melaksanakan rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Kesejahteraan Sosial, Badan Amil Zakat dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Babel. (sf)

SBY Diharapkan Turun Langsung Benahi Papua

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun langsung membenahi Papua dan tidak mendelegasikan hal ini kecuali dengan mandat penuh.

Demikian disampaikan Priyo dalam Diskusi bertajuk Papua dan Masa Depan Indonesia Memperingati lima puluh tahun Papua bergabung dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Selasa (16/4), di Press Room DPR RI, yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Damianus Idji, Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro.

Dalam diskusi tersebut Jimmy mengatakan bahwa dalam masa kini ia percaya adanya kemajuan. Meski di tanah Papua masih terdengar jeritan kegetiran, mulai dari persoalan kesejahteraan, pelanggaran HAM dan kian tersisihnya warga Papua. Akibatnya masyarakat Papua yang kecewa berusaha mencari alternatif lain untuk memisahkan diri dari NKRI. Meski sebagian besar juga masih ingin merdeka dalam NKRI.

Priyo mengatakan, sejauh ini pemerintah pusat telah memperlakukan istimewa dua propinsiitu, yakni Papua dan Aceh. Diantaranya dengan memberikan kesempatan “pu-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam Diskusi bertajuk Papua dan Masa Depan Indonesia Memperingati 50 tahun Papua bergabung dalam NKRI.

tra asli” daerah Papua untuk menjadi Gubernur dan kepala daerah setempat.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan anggaran sebesar Rp 32 triliun untuk Papua dan Rp 25 Triliun untuk Aceh. Dengan hanya berpenduduk 2,6 juta dikatakan Priyo seharusnya daerah dan masyarakat Papua dan Aceh sudah sangat bersinar (*maju-red*). Khususnya untuk fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Namun hal itu menurut Priyo seperti “Jauh Panggang dari Api” atau dengan kata lain pada kenyataannya 37,5 persen pembangunan daerah Papua masih di bawah standar.

“Saya tahu sekali selama ini sudah ada ketulusan dari Pemerintah pusat untuk memperlakukan istimewa kedua Provinsi, Aceh dan Papua. Semua apa yang diinginkan atau diminta Papua diberikan, kecuali memisahkan diri dari NKRI. Namun kenyataannya dana 32 triliun dengan penduduk 2,6 juta jiwa yang seharusnya bisa membuat Papua sangat bersinar, namun kenyataannya 37,5 persen pembangunan masih di bawah standar,” jelas Priyo.

Menurut Priyo, Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) No. 21 tahun 2001 masih belum diimplementasikan secara konsisten. Ratusan Peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang Papua juga masih *stuck*. Selain itu pemerintah daerah setempat, MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRD juga harus bertanggung jawab dengan 22 Perdasi dan 12 Perdusus yang juga masih *stuck*. (Ayu)Foto: wy/parle

DPR Dorong Peningkatan Dana Bagi Hasil Migas untuk Daerah



Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali bertukar cendera mata dengan Bupati Bangkalan.

Komisi VII DPR mendorong peningkatan dana bagi hasil migas untuk daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten se-Madura dari sektor Migas dapat semakin besar untuk pembangunan daerah.

“Komisi VII DPR mendukung dan mendorong kinerja peningkatan produksi Migas di Madura yang hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Madura,” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, saat Kunjungan Kerja ke wilayah Jawa Timur khususnya Madura, di Gedung Bupati Bangkalan, Madura, Selasa (16/4).

Zainudin meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

agar memenuhi komitmen untuk melakukan *content local* dalam operasional kegiatan Migas, dengan memanfaatkan produk lokal daerah Madura serta menggunakan dan mengakomodir putra daerah Madura untuk terlibat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan migas.

“Kita juga meminta memaksimalkan peningkatan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan program kemitraan dan bina lingkungan KKKS Migas untuk masyarakat di sekitar Lokasi Migas dan masyarakat Madura pada umumnya,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, saat melakukan kegiatan migas di Madura agar selalu menjaga dan menghormati kearifan lokal masyarakat Madura, nilai-nilai agama dan budaya serta menjaga kelestarian lingkungan. “Kita menekankan agar peningkatan produksi migas di Madura harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dan BNI menyerahkan bantuan Komputer, Printer dan Modem senilai Rp. 1.26 Miliar kepada sejumlah sekolah yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pemekasan dan Sumenep. (si)

Komisi VIII Apresiasi Kerukunan Beragama di Kalbar

Dalam membangun kerukunan beragama, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sangat baik. Keharmonisan sangat dijaga. Bangunan rumah-rumah ibadah berdiri berdampingan dan saling bertoleransi satu sama lain. Demikian dikemukakan Ketua Tim Komisi VIII yang melakukan kunjungan kerja ke Pontinak, Kalbar, Sayed Fuad Zakaria (F-PG).

“Terus terang saya mengapresiasi setelah mendengarkan informasi baik pada saat kunjungan ke pura maupun informasi yang kita peroleh. Ternyata Kalbar ini di bidang agama sangat rukun. Itu bisa kita lihat bagaimana rumah-rumah ibadah itu bertetangga,” katanya saat ditemui Parlemen di Pontianak, Rabu (17/4).

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Anggota F-PG ini, forum kerukunan umat beragama sudah berjalan. Saling pengertian antarpimpinan um-

mat beragama juga terlihat sangat baik. “Saya lihat saat berkunjung ke pura di situ sangat bagus dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan kerukunan umat beragama.”



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria.

Sementara bicara soal pos anggaran untuk membangun kerukunan beragama, Wakil Ketua Komisi VIII ini mengungkapkan, sudah ada pos anggarannya di Kementerian Agama. Anggaran itu untuk membangun sarana ibadah, infrastruktur, dan penyuluhan-penyuluhan. Selama 3 tahun terakhir ini, kata Fuad, alokasinya cukup signifikan.

Dalam setiap rapat kerja dengan Menteri Agama, pos anggaran selalu didorong untuk ditingkatkan. “Anggaran sudah memadai tapi belum maksimal. Tiap tahun diupayakan meningkat agar fungsi keagamaan berjalan baik.” Di sinilah pentingnya menjaga keragaman yang ada di Indonesia. Heterogenitas masyarakatnya tidak bisa dinafikkan. Ia malah harus menjadi sumber kekuatan bangsa Indonesia. (mh)

Pemerintah Diminta Berdayakan Perempuan NTT



Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso.

Permasalahan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, karena itu perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah dan organisasi peduli perempuan untuk memberdayakan perempuan di daerah ini.

“Perlu adanya gerakan dari Pemerin-

tah dan organisasi masyarakat peduli perempuan untuk memberdayakan perempuan di daerah,” kata anggota DPR RI Sumarjati Arjoso, saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi VIII di Provinsi NTT, Senin (15/4).

Sumarjati Arjoso, menjelaskan permasalahan perempuan di NTT terutama disebabkan kemiskinan, pendidikan, dan juga masalah adat. Selain itu karena masih tingginya kemiskinan, dan kurangnya lapangan kerja sehingga banyak perempuan NTT yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. “Kurangnya lapangan kerja dan rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) NTT, membuat tingginya angka TKW NTT,” ungkapnya.

Selanjutnya kata Sumarjati pelayanan kesehatan pun masih rendah, karena terkendala infrastruktur menuju tempat pelayanan kesehatan. “In-

frastruktur yang buruk menghambat perempuan menuju puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, meskipun pelayanan kesehatan gratis namun memerlukan biaya yang tinggi untuk mencapai puskesmas,” katanya.

Untuk itu dia berharap, Pemerintah harus memberikan perhatian terhadap perempuan miskin di pedesaan, kebanyakan di pedesaan NTT. Potensi pertanian yang tinggi perlu didukung infrastruktur yang memadai, sehingga hasil pertaniannya bisa dipasarkan dengan baik. “Kita berharap pemerintah daerah dan pusat harus memperhatikan infrastruktur agar akses masyarakat desa yang jauh dari kota ini bisa lebih baik yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (as)



Wakil Sekjen DPR Achmad Djuned memimpin Apel Bersama.

Wasekjen DPR Harapkan Pamdal Tingkatkan Profesionalitas

Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR/MPR/DPD RI serta Kepolisian yang ada di lingkungan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, mengadakan apel bersama pengamanan. Apel bersama dipimpin oleh Inspektur Apel Wakil Sekjen DPR RI Achmad Djuned digelar di halaman Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (17/04).

Kegiatan ini merupakan acara rutin memasuki masa reses. Dalam masa reses saat ini anggota DPR lebih banyak berada di daerah pemilihan masing-masing, sehingga pamdal banyak melakukan kegiatan terutama bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*.

“Pada prinsipnya semua kegiatan yang dilakukan pamdal harus sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) sehingga mampu meningkatkan profesional. Apalagi memasuki tahun politik tahun 2013, disusul pemilu pada tahun 2014 dan selanjutnya pelantikan Anggota DPR dan Presiden pada tahun yang sama. Oleh karena itu mulai dari sekarang kita harus meningkatkan profesionalisme pamdal,” tandas Wakil Sekjen DPR RI Achmad Djuned.

Dikatakannya, peran pamdal di DPR sebagai lembaga politik banyak menghadapi dinamika. Oleh karena itu pamdal sebagai satuan terdepan selalu harus waspada terhadap adanya bahaya-bahaya seperti gangguan keamanan dan terorisme. Selain itu pamdal harus mampu menangani unjuk rasa yang hampir setiap hari selalu terjadi di DPR RI dengan jumlahnya cukup banyak bahkan hingga ribuan pendemo. Oleh karenanya pamdal dituntut untuk dapat memberikan pengamanan secara profesional.

Peningkatan profesionalisme, ujar Wasekjen DPR, petugas Pamdal hendaknya selalu menjaga kesehatan fisik dan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi dan harus taat pada HAM.

Keberadaan pamdal amat sangat penting bagi kegiatan-kegiatan anggota dewan, sekretariat dan bagi orang-orang di lingkungan Setjen DPR. Tugas pamdal yang utama yaitu pengamanan material seperti barang dan aset-aset negara. Selain itu pengamanan personal yaitu pengaman bagi orang-orang yang beraktifitas di lingkungan Setjen DPR.

Tidak akan mungkin kegiatan-kegiatan kedewanan akan berjalan dengan lancar tanpa adanya pengamanan yang baik dan kerjasama dengan orang-orang di lingkungan Setjen DPR. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Mardian Umar “Kami mengharapkan adanya pengertian dan kerjasama dari seluruh pihak yang beraktifitas di lingkungan Setjen DPR untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Karena pamdal saja tidaklah mungkin bisa bekerja tanpa dukungan dari orang-orang yang beraktifitas disini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kabag Pengamanan Dalam Setjen DPR, Dwi Marjanto se usai apel bersama pamdal DPR/MPR/DPD RI. “Dalam menangani demonstran pamdal harus menunjukkan profesionalisme kerjanya karena mereka yang unjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi ke DPR. Apel bersama merupakan upaya Pamdal DPR RI untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga yang ada dalam satu lingkungan yaitu DPR, MPR dan DPR RI,” tambahnya. (w)

Belum Ada Alat Deteksi Otomatis Gas Beracun Sekitar Kawah Timbang



Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nurwahid berbincang dengan Direktur Tanggap Darurat BNPB Tri Budiarto.

Dalam kunjungan spesifiknya ke Kawah Timbang, Banjarnegara Komisi VIII DPR RI menemui beberapa permasalahan atau kekurangan, terkait antisipasi terjadinya kemungkinan terburuk dari meningkatnya aktivitas Gunung Dieng, dan semburan gas beracun yang belakangan mulai keluar dari lembah-lembah sekitar kawah Timbang. “Kami melihat belum adanya pos pengamatan di sekitar Dusun Simbar yang merupakan dusun terdekat dari Kawah Timbang. Selama ini rumah warga yang menjadi pos pengamatan. Selain itu, aparat setempat

belum memiliki alat pendeteksi otomatis jika kadar CO₂ meningkat dan melebihi ambang batas normal,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nurwahid yang ikut dalam rombongan kerja ke Kawah Timbang, Banjarnegara.

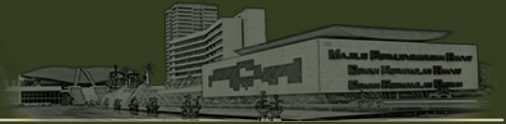
Padahal menurut Hidayat alat pendeteksi otomatis itu sangat penting. Artinya jika ada gas beracun yang muncul di kawasan tersebut maka alat itu akan langsung mendeteksinya dan memberikan tanda-tanda yang bisa dilihat atau didengar langsung oleh seluruh masyarakat, seperti halnya sirine.

Seperti informasi yang di dapat dari Wakil Bupati Banjarnegara-

gara, Hadi Supeno maupun dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) selama ini aparat setempat hanya melakukan pendeteksian gas beracun di sekitar Kawah Timbang dengan cara manual, yaitu dengan pengamatan langsung dari Petugas PVMBG. Dan penyampaian informasi dari PVMBG kepada seluruh masyarakat bahwa daerah tersebut dalam kondisi bahaya gas beracun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini tentu akan menjadi kendala mengingat jarak antara satu dusun ke dusun lainnya tidaklah dekat.

Oleh karena itulah, Hadi Supeno meminta Komisi VIII DPR RI menyarankan kepada pemerintah pusat untuk menyediakan alat pendeteksi otomatis atas adanya gas beracun yang muncul dari lembah-lembah seperti yang dimiliki Kawasan Gunung berapi lainnya. Mendengar permintaan tersebut, Komisi VIII DPR RI berjanji akan meneruskannya kepada Pemerintah Pusat, demi antisipasi terjadinya hal-hal terburuk yang tidak diinginkan. (Ayu) foto:ayu/parle





Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Pramono Anung Wibowo menerima kunjungan kehormatan Dubes Ekuador untuk Indonesia Eduardo Calderon di Gedung Nusantara III DPR RI. Kamis (18/04)/Foto: Iwan Armanias/Parle.



Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto didampingi Ferari Romawi menerima kunjungan kehormatan Secretary (Head) of the Australian Department of Foreign Affairs and Trade Mr. Peter Varghese AO di Gedung Nusantara I DPR RI. Kamis(18/04)/Foto: Iwan Armanias/Parle.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI saat menerima penjelasan dari Kepala Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api, Hendrasto, dan BNPB, Kawah Timbang, Batur Banjarnegara. Sabtu (13/04)/Foto: Ayu/Parle.



Plt. Rektor Unnes Agus Wahyudin memberikan penjelasan tentang pendistribusian lembar jawaban Ujian Nasional kepada Tim Komisi X DPR RI. Senin (15/04)/Foto: Eka Hindra/Parle.



Wakil Sekjen DPR RI Achmad Djuned didampingi Deputi Administrasi Slamet Sutarsono dan Kepala Biro Umum Mardian Umar saat mengikuti apel bersama Pengamanan Sekretariat Jenderal DPR RI di halaman Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (17/04)/Foto: Wahyu/Parle.

